Efisiensi Penyerapan DBHCHT, Mas Rusdi Minta Alokasi 2026 Harus Banyak Inovasi Sosialisasi



Kamis, 30 April 2026

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar evaluasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) triwulan pertama 2025. Rapat ini dihadiri para kepala dinas terkait dan dipimpin Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo.

Evaluasi ini penting untuk meninjau capaian triwulan pertama dan menyikapi perubahan regulasi nasional DBHCHT. Bupati Rusdi menyebutkan adanya Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang memungkinkan daerah menyesuaikan penggunaan DBHCHT sesuai prioritas, namun tetap selaras program nasional.

Alokasi DBHCHT nasional mengalami penurunan dari Rp 3,5 triliun di 2025 menjadi Rp 1,7 triliun di 2026. Hal ini berdampak pada pengurangan pembagian dana untuk seluruh daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan.

Serapan anggaran DBHCHT masih minim, baru 25% di triwulan pertama 2026. Bupati Rusdi menekankan pentingnya optimalisasi program dan perbaikan kinerja agar serapan bisa meningkat seiring berjalannya waktu.

Bupati juga menyoroti perkembangan positif petani tembakau dan meminta dukungan Dinas Pertanian. Ia juga mendorong inovasi sosialisasi "Gempur Rokok Ilegal" yang lebih kreatif dan efektif, dengan fokus mempromosikan wisata daerah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.